



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EKO HARYATI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 473811

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.280.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 895.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 86 m2/76 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
3. Tanah Seluas 90 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 205.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 167.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 25.600.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.275.671.566

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.748.271.566

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.748.271.566



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMAD MANSUR
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 212764

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.106.305.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 792 m²/63 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 410.305.000
2. Tanah Seluas 400 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. Tanah Seluas 749 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 136.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 21 m²/1 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 463.000.000

1. MOTOR, YAMAHA 2DP-R A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
2. MOTOR, HONDA D1A02N13M1 AT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 243.000.000
4. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
5. MOBIL, TOYOTA AGYA 1.2 G AT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 282.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 444.764.202



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.296.069.202

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.296.069.202

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SLAMET GUNANTO**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **222986**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 802.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m²/45 m² di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 276 m²/160 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 552.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 365.400.000

1. MOBIL, HONDA BRIO SATYA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000
3. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO D1AO2N18M1 Tahun 2019, HADIAH Rp. 15.000.000
5. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER EXCEED K Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000
6. MOTOR, YAMAHA BBS M/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 30.900.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 22.400.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 12.860.589

F. HARTA LAINNYA Rp. 743.404.690

Sub Total Rp. 1.946.065.279



III. HUTANG

Rp. 168.500.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.777.565.279

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.